

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan organisasi koperasi di Indonesia memiliki landasan yang tertuang dalam UUD tahun 1945 khususnya pasal 33, tentang pokok-pokok perkoperasian dan disempurnakan dengan UU No. 25 tahun 1992, sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu perlu selalu ditingkatkan.

Usaha koperasi dapat bertahan jika mampu menganalisis tantangan, kendala dan peluang yang ada untuk merumuskan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan. Adapun tantangan utama yang dihadapi koperasi dalam pengembangan usaha nasional mendatang adalah mempercepat upaya memperkuat struktur dunia usaha yang menitik beratkan kepada koperasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi pro pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan usaha. Sedangkan tantangan utama yang dihadapi koperasi di masa mendatang adalah meningkatkan daya saing dengan badan usaha non koperasi.

Koperasi merupakan usaha yang harus dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat lingkungannya. Dalam kegiatannya koperasi selalu akan mementingkan pelayanan kepada anggota dan lingkungan

sekitarnya. Menurut ketentuan pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.¹ Dengan demikian, koperasi selain harus mencari laba, juga harus memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Pelayanan koperasi merupakan hak bagi setiap anggota.

Koperasi sebagai salah satu usaha perekonomian masyarakat yang harus dikelola secara produktif, efektif dan efisien. Agar koperasi tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi diharapkan mampu berjalan dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan koperasi agar dapat berkembang dan mendapatkan SHU yang tinggi yaitu dengan cara mengembangkan usaha. Karena dengan usaha yang berkembang koperasi lebih dapat memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Pengembangan usaha merupakan suatu kegiatan dimana usaha tersebut mengalami perubahan dan peningkatan dari keadaan sebelumnya.

Dalam pasal 4 undang-undang nomor 25 tahun 1992 termuat keinginan pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan koperasi. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hanya ada sebagian diantara anggota masyarakat yang benar-benar mampu mengembangkan usaha produksi suatu koperasi. Sedangkan lainnya masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Usaha yang ditempuh lebih berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan sendiri. Sebenarnya

¹UU No. 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Depkop, Pengusaha Kecil dan Menengah, 1992), p. 7

keberadaan koperasi harus menjadi penolong bagi mereka. Koperasi secara ideal dan normatif merupakan wadah yang cocok untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan ekonomi secara bersama. Tentu saja, keberhasilan koperasi dalam memenuhi tuntutan peranannya yang ideal ditentukan oleh kesungguhan semua anggotanya dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka di dalamnya serta keuletan para pengurus dan alat perlengkapan koperasi lainnya dalam menjalankan usaha koperasi.² Oleh karena itu partisipasi anggota yang aktif dapat memaksimalkan usaha koperasi dalam mengembangkan usahanya. Mengembangkan usaha koperasi merupakan tugas bersama antara anggota dan pengurus koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ada beberapa koperasi yang tidak aktif, salah satu penyebabnya karena masalah partisipasi anggota yang rendah, hal ini menyebabkan koperasi tidak dapat mengembangkan usahanya. Data koperasi yang tidak aktif dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Koperasi Yang Tidak Aktif

Tahun	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Persentase
2000	14.147 unit	13,72%
2001	21.010 unit	18,97%
2002	24.857 unit	21,08%
2003	29.381 unit	23,85%,
2004	37.328 unit	28,55%
2005	40.145 unit	29,99%
2006	42.382 unit	30,48%
2007	44.048 unit	43,83 %
2008	46.335 unit	29,84%

Sumber Data : Syahjoni R, Tantangan Membangun Jatidiri Koperasi.
<http://koranbandung.com> (Diakses Tanggal 1 Desember 2010)

²Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), p. 111

Berdasarkan tabel diatas secara rata-rata pertumbuhan jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia selama delapan tahun terakhir mencapai 19,19%. Jika dilihat jumlah koperasi yang sudah tidak aktif ini sudah saatnya koperasi harus dapat memacu diri dalam meningkatkan kinerjanya agar tidak tertinggal jauh dari pelaku-pelaku ekonomi yang lainnya. Dipandang dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan diri, pengembangan usaha, dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggotanya.

Beberapa koperasi pegawai dalam mengelola usaha sulit berkembang dikarenakan belum adanya dukungan yang serius dari para petinggi kantor untuk mengembangkan usaha koperasi. Selain itu, selama ini pengelolaan koperasi kurang profesional sehingga tidak menimbulkan kepercayaan dari para pegawai yang jadi anggotanya dan berakibat kurangnya anggota yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan usaha koperasi. Terakhir, produk atau bentuk pelayanan dan barang yang tersedia di koperasi tidak menarik konsumen atau masih terbatas. Apabila kondisi ini berlangsung terus menerus maka akan terjadi kelemahan sehingga koperasi akhirnya bangkrut.³

Pengembangan usaha koperasi harus dilakukan secara menyeluruh dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan hingga mengawasi kegiatan usaha koperasi sehingga dapat mendapatkan sisa hasil usaha yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pengembangan usaha, koperasi dipengaruhi oleh segala macam faktor seperti sumber daya manusia yang

³Kompas, *Kenapa Koperasi Pegawai Sulit Maju*, 2011, p. 1
(<http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2011/03/21/kenapa-koperasi-pegawai-sulit-maju>)

professional, jumlah modal koperasi, kerjasama dengan badan usaha lain, motivasi berkoperasi, kepemimpinan pengurus, partisipasi anggota.

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Untuk dapat mengembangkan koperasi harus memiliki sumber daya manusia yang profesional yaitu tenaga-tenaga yang mampu dalam manajemen usaha, sehingga dapat meningkatkan kinerja koperasi. Untuk bisa mencapai itu perlu adanya pendidikan dan latihan manajemen usaha bagi anggota, pengurus serta pelaksana koperasi. Dengan ditunjang tenaga yang professional diharapkan pengembangan usaha koperasi baik secara kuantitatif yaitu berdasarkan jumlah atau jenis usaha baru maupun kualitatif yaitu peningkatan kinerja pengurus dan anggota bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan ataupun diharapkan dapat dinikmati bersama-sama.

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan usaha koperasi, koperasi tidak akan bisa berkembang apabila tidak tersedia modal. Modal dapat dijadikan untuk pengembangan usaha koperasi melalui peningkatan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan atau laba bagi koperasi. Dengan modal maka produksi akan berjalan dan produktivitas menjadi tinggi. Oleh karena itu sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, koperasi membutuhkan modal baik dalam arti uang/dana maupun benda-benda modal. Dengan demikian modal sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor

yang akan mempengaruhi koperasi dalam mencapai tujuannya. Karena itulah walaupun koperasi dipandang bukan sebagai perkumpulan modal, namun koperasi tidak dapat lepas dari masalah modal. Untuk itu diperlukan suatu kemampuan dalam pengelolaan modal, agar modal yang telah didapat dan dimiliki menjadi alat untuk dapat mensejahterakan anggota koperasi.⁴ Dalam hal ini Pemerintah memberikan bantuan pinjaman dana bulan Mei tahun 2009 adalah sebesar Rp 64.9 miliar kepada 2.581 unit usaha kecil dan sebesar Rp 11,3 miliar kepada 297 unit usaha koperasi.⁵ Dengan pemberian kredit pada koperasi ini akan meningkatkan permodalan koperasi dalam membiayai usaha koperasi.

Pengembangan usaha koperasi perlu adanya kerjasama atau kemitraan antara pengusaha besar dan kecil. Ini merupakan strategis untuk menyehatkan struktur ekonomi nasional secara keseluruhan, sehingga usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Kemandirian memang merupakan faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan usaha kecil dan koperasi dalam memanfaatkan peluang serta tantangan globalisasi. Manfaat dari jalinan kerjasama antara koperasi dengan pengusaha besar dan kecil amat terasa. Dari kerjasama tersebut koperasi, pengusaha besar dan kecil dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga lebih mengembangkan usaha yang dijalankan. Mekanisme kerjasama yang

⁴Neti Budi Wati, *Manajemen keuangan dan Permodalan Koperasi*, 2010, p.4 ([http://www. File. upi. edu/Direktori/L-Fpeb/Prodi Ekonomi dan Koperasi/196302211987032-Neti Budiwati/Manaj Keuang Kop. Pdf](http://www.File.upi.edu/Direktori/L-Fpeb/Prodi%20Ekonomi%20dan%20Koperasi/196302211987032-Neti%20Budiwati/Manaj%20Keuang%20Kop.Pdf))

⁵Administrator, *CSR Award Koperasi 2009 Diraih 6 Perusahaan, Sebagai Perusahaan Terbaik Pembina Koperasi Dalam Rangka Hari Koperasi Nasional ke-62*, 2009, p.2 (<http://www.depkop.go.id/Juli.htm>)

dilakukan itu berdasarkan kepentingan bersama, sehingga adanya timbal balik yang menguntungkan diantara keduanya. Selain sebagai cara untuk mengikis citra buruk yang saat ini melekat pada koperasidi seluruh Indonesia.

Motivasi berkoperasi merupakan dorongan setiap orang yang mau menjadi anggota koperasi mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dalam menjalankan kegiatan secara efisien dan efektif. Adanya dorongan (motivasi) dari anggota merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan usaha koperasi. Sebagian besar perilaku individu diwarnai oleh motivasi tertentu. Motivasi berkoperasi berkaitan dengan tingkat keyakinan anggota akan terpenuhinya harapan-harapannya oleh koperasi, keinginan anggota untuk memperoleh manfaat berkoperasi serta keyakinan anggota terhadap koperasi bahwa harapan-harapannya akan terpenuhi tergantung dari partisipasinya terhadap koperasi. Untuk itu motivasi berkoperasi ini sangat penting dalam menunjang dan mengembangkan koperasi agar berjalan sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan koperasi.

Kepemimpinan pengurus koperasi dipandang sebagai pengarahan antara pengurus dengan para orang yang terlibat dalam koperasi tersebut yang dilaksanakan dalam suatu situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam AD & ART. Kepemimpinan pengurus koperasi ini penting dalam mengelola usaha koperasi yang mengacu pada AD & ART yang telah dirumuskan sebelumnya. Tetapi ada saja pengurus dalam koperasi yang melakukan penyimpangan terhadap AD & ART yang telah ditetapkan terlihat dari pendelegasian wewenang maupun

pelaksanaan perencanaan koperasi yang tidak berjalan dengan baik yang gilirannya terjadi kerisuhan dalam badan usaha koperasi tersebut baik dari segi kegiatan usaha maupun hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam koperasi tersebut. Hal ini karena pengurus yang mengejar kepentingan sendiri sehingga merugikan anggota⁶. Untuk menyikapi hal tersebut koperasi harus berusaha memperbaikinya dengan cara melibatkan para anggota dimana untuk meningkatkan hal ini diperlukan beberapa hal salah satunya pemberian kredit dengan bunga rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan.

Pengembangan dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada partisipasi anggota-anggotanya. Peran penting koperasi dapat terwujud melalui partisipasi aktif terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi, baik partisipasi sebagai anggota koperasi maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Di lain pihak diduga masih banyak koperasi dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah, Sehingga masalah yang paling kompleks sekarang ini adalah bagaimana menciptakan peran serta atau partisipasi aktif anggota dalam koperasi, sehingga dapat tumbuh dan berkembang untuk kemudian dapat mencapai tujuannya.

Partisipasi dalam koperasi ditujukan pula untuk menempatkan para anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi, peran anggota harus terlihat didalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dari tingkat penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksana untuk merealisasikan

⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta : Erlangga, 2000), p.55

dan pengendalian sosial sesuai kepentingan anggota.⁷ Partisipasi sebagaimana telah dipertimbangkan hendaklah memasukkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab dengan tekanan tertentu pada pentingnya pendapat bersama yang dihasilkan oleh para anggotanya.

Unit usaha pada koperasi saat ini tidak hanya bergerak pada satu unit usaha, namun telah bergerak diberbagai unit usaha termasuk koperasi pegawai. Koperasi pegawai dalam menjalankan usaha sekarang tidak hanya bergerak pada usaha simpan pinjam anggota namun telah bergerak dengan membuka usaha unit baru seperti unit usaha toko, unit usaha kantin, unit usaha photocopy, dsb. Koperasi dalam mengembangkan usaha yang kondusif dapat melakukan berbagai cara antara lain dengan menambah unit usaha, memperluas daerah pemasaran, memperluas kerjasama sehingga nilai SHU yang diperoleh koperasi dapat bertambah yang digunakan koperasi sebagai modal koperasi.

Koperasi pegawai negeri di Jakarta Utara sulit berkembang karena kurangnya partisipasi anggota secara aktif seperti kurangnya partisipasi anggota dalam membeli barang di koperasi akibat terbatasnya barang yang tersedia di koperasi sehingga anggota lebih memilih untuk membeli barang di toko lain. Hal ini menyebabkan beberapa usaha toko di koperasi pegawai negeri di Jakarta utara harus mengurangi beberapa variasi barang yang dijualnya. Di sisi lain dalam usaha simpan pinjam, anggota aktif meminjam namun modal koperasi yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi pinjaman anggota koperasi. Seperti pada

⁷Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi* (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992), p.32

koperasi pegawai kantor kementrian agama di Jakarta utara, pendaan yang belum maksimal menyebabkan usaha simpan pinjamnya kurang berjalan dengan baik. Koperasi ini memiliki jumlah anggota yaitu 1255 namun hanya memiliki dana untuk usaha simpan pinjamnya sebesar 300 juta setiap bulan, sedangkan setiap bulannya yang ingin meminjam ke koperasi tersebut 50 sampai 100 orang anggotanya dan paling kecil mereka ingin meminjam sebesar 5 juta, sehingga setiap bulannya koperasi kekurangan dana untuk memenuhi permintaan anggotanya, hal ini dapat mengurangi laba yang diterima oleh koperasi. Sedangkan beberapa koperasi pegawai negeri yang memiliki dana cukup untuk memenuhi kebutuhan anggotanya memiliki kendala dalam pengembalian pinjaman tersebut, anggota yang meminjam sering kali membayar pinjaman tidak tepat waktu. Menurut salah satu pengurus koperasi pegawai negeri guru dan karyawan (KPN) SMAN 40 Jakarta “salah satu yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi karena alokasi pembayaran gaji anggota koperasi mengalami perubahan, yang tadinya dibayar melalui sekolah secara tunai sehingga dapat langsung dipotong oleh koperasi untuk membayar kewajiban anggota pada koperasi, saat ini gaji dibayarkan melalui bank. Ketika koperasi ingin bekerjasama dengan bank tersebut, agar dapat langsung memotong gaji anggota koperasi, agar usaha koperasi dapat berjalan dengan lancar namun bank tersebut memiliki beberapa persyaratan yang belum sanggup dipenuhi oleh koperasi untuk sekarang ini”. Koperasi pegawai negeri di Jakarta Utara sulit berkembang dapat terlihat dari jumlah koperasi pegawai negeri di Jakarta utara yang terdaftar di sudin yakni 8 koperasi, dan koperasi yang terdaftar di Jakarta Utara secara keseluruhan

berjumlah 53 koperasi. Sedangkan koperasi di Jakarta Utara dapat dikatakan lebih sedikit dibanding jumlah seluruh koperasi di wilayah Jakarta lain yakni 53 koperasi dari 767 koperasi di Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara sumber daya manusia yang profesional terhadap pengembangan usaha pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Utara?
2. Apakah ada pengaruh antara jumlah modal koperasi terhadap pengembangan usaha pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Utara?
3. Apakah ada pengaruh antara kerjasama dengan badan usaha lain terhadap pengembangan usaha pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Utara?
4. Apakah ada pengaruh antara motivasi berkoperasi terhadap pengembangan usaha pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Utara?
5. Apakah ada pengaruh antara kepemimpinan pengurus terhadap pengembangan usaha pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Utara?
6. Apakah ada pengaruh antara partisipasi anggota terhadap pengembangan usaha pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Utara?

C. Pembatasan Masalah

Pengembangan usaha koperasi pegawai Negeri di Jakarta utara dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang professional, jumlah modal koperasi, kerjasama dengan badan usaha lain, motivasi berkoperasi, kepemimpinan pengurus, partisipasi anggota. Karena keterbatasan pengetahuan peneliti dan juga keterbatasan peneliti dalam waktu, dana, tenaga yang mungkin mampu dikerahkan untuk maksud pemecahan keseluruhan masalah itu, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada masalah Pengaruh Antara Partisipasi Anggota Terhadap Pengembangan Usaha Pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Utara.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan ialah “Apakah terdapat pengaruh antara partisipasi anggota terhadap pengembangan usaha pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Utara?”.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Teoretis

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu yang berkepentingan khususnya tentang partisipasi anggota dan pengembangan usaha koperasi. Sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi semua pihak.

2. Bagi Praktis

Penelitian ini berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan partisipasi anggota dan pengembangan usaha koperasi. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.